



## Pemda Diminta Percepat Penyerapan BOKB

**DALAM** upaya mendukung percepatan penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengucurkan anggaran ke pemerintah daerah. Salah satunya dukungan anggaran melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat hadir dalam

Rapat Koordinasi Audit Kasus Stunting Kota Pontianak, belum lama ini, meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses realisasi BOKB. Anggaran tersebut menurutnya harus dipercepat proses penyerapannya, terlebih waktu yang tersisa hanya sekitar dua bu-

• Baca Halaman 11

### Hal 9 ■ pemda diminta

lan lagi.

"Untuk penyerapannya (BOKB) saya minta dipercepat, waktu kita sisa dua bulan," ucap Ria Norsan.

Dalam kesempatan tersebut Norsan juga meminta pemerintah daerah agar bisa menganggarkan penanganan stunting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga upaya percepatan penurunan stunting di Kalbar bisa dilakukan dengan maksimal.

"Pemerintah desa juga boleh menggunakan anggaran desa untuk penanganan stunting," katanya.

Norsan menyebutkan saat rapat bersama Wakil Presiden Republik Indonesia terkait penanganan stunting. Dirinya telah meminta tambahan anggaran untuk percepatan penurunan stunting. Terlebih menurutnya anggaran untuk

stunting tidak seperti penanganan covid-19.

"Padahal beban stunting lebih berat, karena jika stunting maka akan berdampak pada pertumbuhan anak," jelasnya.

Dirinya mengingatkan semua pihak untuk tidak menganggap remeh upaya pencegahan stunting. Karena jika terkena stunting menurutnya akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Sehingga pemerintah memberikan perhatian dalam upaya percepatan penurunan stunting.

"Mari kita sama-sama berkerja untuk menurunkan stunting daerah kita," harapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Pontianak sendiri mendapatkan dukungan anggaran BOKB sebesar Rp4,6 miliar. Namun hingga Oktober realisasi BOKB Kota Pontianak

baru mencapai 18,11 persen. Serapan BOKB Kota Pontianak bahkan jauh dibawah realisasi Kabupaten Melawi yang telah mencapai 46,42 persen.

Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Muslimat sebelumnya juga mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyerapan anggaran. Terutama untuk percepatan penurunan stunting melalui BOKB.

"Kami terus berupaya mendorong pemda melalui kepala daerah untuk segera merealisasikan kegiatan untuk menyerap anggaran yang sudah kita alokasikan," ucap Muslimat.

Dirinya mengungkapkan Kepala BKKBN pusat Hasto Wardoyo yang memiliki pengalaman sebagai bupati dua periode memahami pemerintah daerah membutuhkan anggaran. Sehingga dibantu dengan anggaran

yang tadinya berada di BKKBN. Kemudian kini anggaran tersebut dialokasikan ke pemerintah daerah.

"Kita berharap pemerintah daerah optimal menyerap anggaran tersebut," jelasnya.

Muslimat mengungkapkan dalam upaya percepatan penurunan stunting pemerintah telah menyiapkan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dukungan anggaran operasional penurunan stunting ini diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan dengan sasaran keluarga beresiko, dukungan anggaran tersebut agar dapat segera dioptimalkan," tutupnya. (din)